Analisis Hukum Perkara Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pdg

Legal Analysis of Fidusian Guarantee In The Decision of Padang Country Number 38 / Pdt.G / 2018 / PN PDG

Febi Kinanti Ardo

Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Diterima: 19 Juli 2019; Disetujui: 12 Oktober 2019; Dipublish: Desember 2019

*Corresponding Email: febikinan22@gmail.com

Abstrak

Terjadinya kesepakatan perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara PT. Pro Car International Finance (kreditur) dengan seorang debitur No. No. 0450001897 tertanggal 31 Mei 2014. Pihak Debitur belum memenuhi kewajibannya sejak angsuran ke-32 yang jatuh tempo tanggal 31 Desember 2016. Alasan debitur tidak memenuhi kewajiban karena debitur telah melakukan tindak pidana. Atas keadaan debitur, maka pihak PT. Pro Car International Finance menyatakan bahwa debitur telah melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum dalam Perkara nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Pdg, kedua, mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap tindak perbuatan melawan hukum dalam Perkara nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Pdg. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian didapat, pertama bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Pdg berupa, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Hasil yang kedua, bahwa dasar pertimbangan Hakim memberikan putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Pdg adalah debitur telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan hakim kemudian mengabulkan sebagian tuntutan agar Tergugat membayar kerugian sebesar Rp 82.745.681,00 dengan bunga dan denda.

Kata Kunci: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Jaminan Fidusia.

Abstract

The occurrence of the agreement on a vehicle financing agreement with the transfer of ownership rights fiduciary between PT. Pro Car International Finance (creditor) with a debtor No. No. 0450001897 dated May 31, 2014. The Debtor has not fulfilled its obligations since the 32nd installment due on December 31, 2016. The reason the debtor did not fulfill the obligation because the debtor has committed a crime. Upon the situation of the debtor, the PT. Pro Car International Finance states that the debtor has violated Article 1365 and Article 1366 of the Civil Code. The purpose of this study is first, to find out the form of acts against the law in Case number: 38 / Pdt.G / 2018 / PN Pdg, second, to find out the basis for judges' consideration of acts against the law in Case number: 38 / Pdt.G / 2018 / PN Pdg. This research method is normative juridical with qualitative analysis and presented descriptively. The results obtained, firstly, that the form of acts against the law in case number: 38 / Pdt.G / 2018 / PN Pdg in the form, acts that are contrary to their own legal obligations. The second result, that the basis for consideration of the Judge gave a decision on a lawsuit against the law in case number: 38 / Pdt.G / 2018 / PN Pdg is the debtor has been proven to have committed an unlawful act and the judge granted part of the demand for the Defendant to pay a loss of Rp 82,745.681.00 with interest and penalties.

Keywords: Lawsuit Against the Law, Fiduciary Guarantee.

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Siamat, 2001). Adanya pembiayaan konsumen (*consumer finance*) saat ini masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya untuk membeli barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10 sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya (Witanto, 2015).

Pembiayaan yang dilakukan konsumen didasarkan atas perjanjian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, mengikat bagi kedua belah. Perjanjian dalam lembaga pembiayaan inilah yang dinamakan dengan perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit Nainggolan & Isnaini, (2012), Hidayat & Ediwarman, (2013),

Adanya kesepakatan perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara PT. Pro Car International Finance (kreditur) dengan seseorang bernama Riri Sukardi (debitur) No. 0450001897 tertanggal 31 Mei 2014 (P-3), sertifikat fidusia W3.00075541.AH.05.01 Tahun 2014 (P-4). Dengan spesifikasi unit jaminan fidusia sebagai berikut: Merk/Type Mitsubishi/Colt Diesel FE74S (4x2) M/T, No. Rangka: MHMFE74P4AK039808, No. Mesin: 4D34TF67434 Tahun 2010 dengan nomor polisi, BA 9714 YJ.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengamanan pemberian kredit tersebut sesuai dengan

ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Bank yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Jika debitur menunaikan prestasinya dengan baik, maka kreditur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap benda fidusia dan dengan sendirinya hak kepemilikan beralih kembali kepada pemberi fidusia (Alodia & Pandamdari, 2018; Chintia, 2010; Kamello, 2006; Hamzah & Manullang, 1987).

Disepakati jumlah pembiayaan pokok beserta bunga sebesar Rp 281.038.272,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani perjanjian. Riri Sukardi selaku debitur diwajibkan membayar angsuran yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 setiap bulannya dengan angsuran sebesar Rp 5.854.964,00 (lima juta delapan ratus lima puluh empat sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

Setelah dibuat dan ditandatanganinya perjanjian maka telah muncul yang namanya hak dan kewajiban, akan tetapi pihak Riri Sukardi dalam melaksanakan perjanjiannya selalu ingkar janji dan dalam memenuhi kewajibannya selalu terlambat atau tidak tepat waktu. Dan Riri Sukardi belum memenuhi kewajibannya sejak angsuran ke-32 yang jatuh tempo tanggal 31 Desember 2016. Pihak PT. Pro Car International Finance mendapatkan informasi dari keluarga Riri Sukardi dalam hal ini Riri telah melakukan perkara tindak pidana yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 33/Pid.B./LH2017/PN.Pnn, terkait pelanggaran tindak pidana pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang mana menetapkan 1 unit mobil dengan nomor polisi BA 9714 YJ dirampas untuk negara. Terdapat kelalaian Riri di atas

dengan ini, pihak PT. Pro Car International Finance menyatakan bahwa Riri telah melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Analisis Hukum Perkara Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Negeri PADANG NOMOR 38/PDT.G/2018/PN PDG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ibrahim, 2005). Analisis terhadap permasalahan dilakukan dengan analisis kualitatif yakni dengan cara menganalisis permasalahan dengan teori serta menganalisis putusan hakim yang dijadikan objek kajian permasalahan (Sunggono, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Nomor 38/pdt.G/2018/PN Pdg

PT. Pro Car International Finance merupakan perusahaan pembiayaan di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang bergerak di dalam bidang usaha penyediaan dana yang akan digunakan konsumen atau masyarakat dalam menjalankan usahanya. Dalam hal inilah maka Riri Sukardi ingin memperoleh dana pinjaman kredit dari PT. Pro Car International Finance dengan tujuan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor sebagai guna usaha. Dan pada tanggal 31 Mei 2014 ditandatangani perjanjian kredit antara PT. Pro Car International Finance dengan Riri Sukardi sebesar Rp 281.038.272,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga

puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Fasilitas tersebut digunakan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani perjanjian. Riri Sukardi selaku debitur diwajibkan membayar angsuran yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 setiap bulannya dengan angsuran sebesar Rp 5.854.964,00 (lima juta delapan ratus lima puluh empat sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Setelah dibuat dan ditandatanganinya perjanjian maka telah muncul yang namanya hak dan kewajiban, akan tetapi pihak Riri Sukardi dalam melaksanakan perjanjiannya selalu ingkar janji dan dalam memenuhi kewajibannya selalu terlambat atau tidak tepat waktu. Dan Riri Sukardi (debitur) belum memenuhi kewajibannya sejak angsuran ke-32 yang jatuh tempo tanggal 31 Desember 2016.

Pihak PT. Pro Car International Finance mendapatkan informasi dari keluarga Riri Sukardi dalam hal ini Riri telah melakukan perkara tindak pidana yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 33/Pid.B./LH2017/PN.Pnn, terkait pelanggaran tindak pidana pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang mana menetapkan 1 unit mobil dengan nomor polisi BA 9714 YJ dirampas untuk negara. Terdapat kelalaian Riri di atas dengan ini, pihak PT. Pro Car International Finance menyatakan bahwa Riri telah melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta.

PT. Pro Car International Finance menyatakan Riri Sukardi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat merasa sangat dirugikan dengan dirampasnya objek jaminan fidusia tersebut diatas yang mana objek jaminan tersebut tidak dapat lagi dilakukan eksekusi jaminan fidusia oleh penggugat

dan kedudukan penggugat sekarang hanyalah sebagai kreditur konkuren yang hanya memiliki jaminan umum (tidak ada benda tertentu yang dijadikan jaminan untuk utang debitur).

Pada keadaan benda jaminan fidusi dirampas negara, apabila objek jaminan tersebut tidak dikembalikan kepada pihak kreditur atau pada keadaan kredit yang diterima oleh pihak debitur sudah jatuh tempo dan tidak terbayarkan sementara objek jaminan belum dikembalikan kepada kreditur, sehingga keberadaan pihak kreditur berada dalam posisi yang lemah, tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Dan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat tersebut, maka penggugat menuntut agar tergugat membayar kerugian sebesar Rp 82.745.681,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dengan bunga dan denda.

Perbuatan melawan hukum, prinsip dasarnya tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Artinya, setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membebaskan kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang bersalah. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yaitu (Djojodirjo, 1992): a) Melanggar hak orang lain; b) Bertentangan dengan Kewajiban hukum Si Pelaku; c) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik; d) Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pdg berdasarkan keterangan para saksi maupun dari surat-surat bukti yang diajukan kreditur/penggugat. Perbuatan melawan hukum kreditur adalah perbuatan merugikan hak orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini berdasarkan tindakan pihak Riri Sukardi selaku tergugat yang

telah melakukan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya membayarkan angsuran dan terbukti melakukan tindak pidana dalam hal lain yang menyebabkan hilangnya objek jaminan fidusia sehingga tidak dapat lagi dilakukan eksekusi jaminan fidusia kemudian menjadikan kedudukan penggugat sekarang hanyalah sebagai kreditur konkuren.

Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pdg

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus memiliki alasan dan dasar yang jelas, serta memuat pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara. Dalam Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Pdg, hakim mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tentang perbuatan melawan hukum. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru.

Pengadilan Negeri Padang dalam menyelesaikan perkara gugatan perbuatan melawan hukum, telah memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yang telah memanggil para pihak secara patut dan layak. Selanjutnya Pengadilan Negeri Padang mempelajari serta meneliti bukti-bukti dari berkas perkara yang menjadi dasar gugatan pihak Penggugat maupun jawaban dari pihak Tergugat serta bukti lainnya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena itu ganti kerugian dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, karena ganti kerugian dalam tuntutan perbuatan melawan hukum adalah merupakan unsur yang harus ada apabila perbuatan melawan hukum

tersebut terbukti menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tuntutan ganti rugi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Langkah selanjutnya Majelis Hakim menentukan besarnya ganti kerugian. Besarnya ganti kerugian dikabulkan secara *ex aequo et bono* yaitu menurut asas keadilan dan rasa keadilan (Putusan Mahkamah Agung No. 999/K/Pdt/1992).

Putusan Hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala Hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya Hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan Hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Hakim mengeluarkan putusan untuk mengabulkan sebagian gugatan perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Hasil putusan perkara Nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Pdg adalah: 1) Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah; 2) Menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara *verstek*; 3) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 4) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 0450001897 tertanggal 31 Mei 2014 dengan sertifikat fidusia Nomor: W3.00075541.AH.05.01 Tahun 2015 sah secara hukum dan mengikat para pihak; 5) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 82.745.681,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dengan bunga dan denda yang timbul; 7) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan

selebihnya; 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim, maka dalil-dalil gugatan yang termuat dalam posita gugatan maupun tuntutan yang termuat dalam petitum gugatan menurut Majelis adalah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya untuk dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*). Sampai saat ini putusan masih belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan Tergugat masih tersangkut kasus tindak pidana yang mana menetapkan satu unit mobil dirampas oleh negara, dalam hal ini merupakan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dengan Penggugat. Jadi Tergugat masih harus menjalani hukuman dan menyelesaikan kasus tindak pidana tersebut terlebih dahulu, agar mobil yang disita tersebut dapat dikembalikan kepada Tergugat. Putusan belum dapat dijalankan sebelum Tergugat menyelesaikan kasus tindak pidana nya terlebih dahulu baru kemudian mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dapat dikembalikan oleh Negara. Agar Tergugat dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

SIMPULAN

Bentuk perbuatan melawan hukum terkait kasus jaminan fidusia dalam Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Pdg antara lain: perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Perbuatan ingkar janji tergugat karena Tergugat belum memenuhi kewajibannya sejak angsuran ke-32 yang jatuh tempo Tanggal 31 Desember 2016 hingga saat ini. selain itu, adanya kelalaian pihak Tergugat karena telah melakukan pelanggaran tindak pidana yang mana menetapkan 1 unit mobil dengan nomor polisi BA 9714 YJ dirampas untuk negara. Hal ini sangat

merugikan pihak Penggugat, karena mobil yang dirampas untuk negara tersebut merupakan objek jaminan fidusia.

Putusan Hakim atas gugatan perbuatan melawan hukum terkait kasus jaminan fidusia dalam Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Pdg didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan agar Tergugat membayar kerugian sebesar Rp 82.745.681,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dengan bunda dan denda. Menimbang untuk menolak tuntutan diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, sedangkan dalam perkara ini belum pernah dilakukan penyitaan. Menurut Penulis amar dan keputusan Hakim sudah mencerminkan asas kemanfaatan, asas kepastian dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djojodirjo, M. (1992). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ibrahim, J. (2005). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Siamat, D. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Witanto, D. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Nainggolan, P.N.H., dan Isnaini, (2012), Analisis Terhadap Penetapan No: 01/Pen.Pdt.G/Eks/HT/2010/ PN-PMS tentang Eksekusi Barang Jaminan oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah, *Mercatoria*, 5 (1): 56-65
- Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), *Mercatoria*, 6 (1): 44-63
- Alodia, D. & Pandamdari, E.(2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitor Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016), *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1).
- Chintia, N.Y. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terkait dengan Penyalahgunaan Objek Jaminan oleh Debitur". (Thesis S2, Universitas Indonesia, 2010).
- Kamello, T. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*. Bandung: PT Alumni.
- Hamzah, A dan Manullang, S. (1987). *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. (Jakarta: Ind-Hill Co.